

## Ancaman Non-Tradisional dalam Keamanan Maritim: Studi Kasus Perompakan di Perairan Asia Tenggara

Muh. Ibnu Bintang

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM 10, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan

Korespondensi: [ibnubintang.313@gmail.com](mailto:ibnubintang.313@gmail.com)

**Abstract.** *Sea armed robbery is one of the growing non-traditional threats that has a significant impact on maritime security in Southeast Asia. This study aims to examine the dynamics of sea armed robbery in the Southeast Asian region and analyze regional efforts through various multilateral and bilateral cooperation mechanisms. The method used in this research is a qualitative study with a descriptive-analytical approach. There are countermeasures through forums such as the ASEAN Maritime Forum (AMF), ASEAN Coast Guard Forum (ACGF), and the ReCAAP agreement in reducing piracy incidents. However, these efforts still face challenges. Therefore, it is necessary to strengthen institutional capacity, harmonize policies, and increase trust and collaboration between countries to form a regional maritime security system that is more resilient and adaptive to dynamic threats.*

**Keywords:** *Southeast Asia region, maritime piracy, maritime security, human security, non-traditional threats, ASEAN*

**Abstrak.** Perompakan laut merupakan salah satu bentuk ancaman non-tradisional yang terus berkembang dan berdampak signifikan terhadap keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika perompakan laut di wilayah kawasan Asia Tenggara serta menganalisis upaya regional yang dilakukan melalui berbagai mekanisme kerja sama multilateral dan bilateral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Terdapat upaya penanggulangan melalui forum seperti *ASEAN Maritime Forum (AMF)*, *ASEAN Coast Guard Forum (ACGF)*, dan perjanjian *ReCAAP* dalam meredam insiden perompakan. Namun dalam upaya ini masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan kepercayaan dan kolaborasi antarnegara untuk membentuk sistem keamanan maritim kawasan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap ancaman yang bersifat dinamis.

**Kata kunci:** Kawasan Asia Tenggara, perompakan laut, keamanan maritim, keamanan manusia, ancaman non-tradisional, ASEAN

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam konteks global Laut dan wilayah maritim memiliki signifikansi strategis dalam mendukung arsitektur perdagangan internasional. Sekitar 80% volume perdagangan global bergantung pada jalur pelayaran laut, menjadikan sektor ini sebagai komponen esensial dalam rantai pasok dunia. Konsekuensinya, setiap bentuk gangguan terhadap stabilitas jalur maritim dapat menimbulkan efek domino terhadap perekonomian global, seperti meningkatnya harga energi, kelangkaan barang kebutuhan pokok, hingga ancaman terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Prakoso., et al, 2025).

Keamanan maritim berkorelasi erat dengan kapasitas dan upaya negara-negara dalam menjaga wilayah yurisdiksi serta batas-batas maritimnya dari berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengancam kedaulatan nasional di sektor

kelautan (Labibah & Fatimah, 2024). Namun, di tengah kompleksitas geopolitik dan keterbatasan sumber daya, banyak negara menghadapi kesulitan dalam menanggulangi ancaman-ancaman non-tradisional. Salah satu ancaman yang masih menjadi perhatian utama adalah perompakan maritim, yang terus terjadi di perairan Asia Tenggara.

Dalam konteks Asia Tenggara, keamanan maritim menjadi isu krusial mengingat kawasan ini merupakan titik temu berbagai jalur pelayaran internasional, termasuk Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan Laut Sulu yang strategis namun rawan. Stabilitas keamanan maritim di suatu kawasan dapat dikatakan tercapai apabila tidak terdapat ancaman terhadap keselamatan dan ketertiban laut, seperti konflik antarnegara, terorisme maritim, pembajakan, perdagangan narkoba dan manusia, kejahatan lingkungan, serta risiko bencana dan kecelakaan laut (Keliat, 2019).

Kawasan maritim Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah paling strategis dalam sistem pelayaran dan perdagangan global. Posisi geografisnya yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikannya sebagai jalur transit utama bagi ribuan kapal setiap tahunnya. Namun, di balik signifikansi tersebut, kawasan ini juga memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap potensi konflik. Ancaman-ancaman tersebut tidak hanya bersifat tradisional seperti sengketa teritorial dan rivalitas militer, tetapi juga mencakup dimensi non-tradisional seperti perompakan, terorisme maritim, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba (Ridaho & Sudirman, 2020).

Ancaman non-tradisional merujuk pada jenis ancaman yang tidak berasal dari agresi militer antarnegara, melainkan dari aktor non-negara atau dinamika transnasional yang tidak selalu bersifat militeristik namun tetap berdampak signifikan terhadap keamanan nasional dan regional. Perompakan laut, sebagai salah satu bentuk ancaman non-tradisional, menjadi isu utama dalam penulisan ini. Berbeda dengan ancaman tradisional yang mengandalkan instrumen kekuatan militer, ancaman non-tradisional sering kali bersifat asimetris dan sulit dideteksi, serta menuntut pendekatan keamanan yang lebih kolaboratif dan multidisipliner.

Dalam konteks hukum internasional, perompakan laut memiliki keterkaitan erat dengan dinamika hubungan internasional karena melibatkan tindakan yang terjadi di wilayah laut dan berdampak pada stabilitas global. Hukum kebiasaan internasional telah lama mengakui bahwa perompakan merupakan pelanggaran serius yang mengganggu ketertiban di laut serta menghambat arus perdagangan antarnegara. Secara umum, perompakan didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau penahanan yang dilakukan secara melawan hukum di laut lepas oleh individu yang menggunakan suatu kapal terhadap kapal lain, dengan motif keuntungan pribadi. Namun demikian, praktik perompakan tidak terbatas pada laut lepas saja, melainkan juga dapat

terjadi di perairan yang berada di bawah yurisdiksi nasional suatu negara (Hutagalung., et al, 2020).

Posisi strategis wilayah maritim menjadikan perairan Kawasan Asia Tenggara pusat berbagai kepentingan nasional dan internasional, yang pada akhirnya memunculkan isu-isu keamanan kawasan. Keamanan maritim mengacu pada kondisi aman dan stabilnya wilayah laut dari berbagai bentuk ancaman yang berpotensi mengganggu kepentingan negara-negara di sekitarnya. Di kawasan Asia Tenggara, dominasi perairan sebagai jalur utama perdagangan dan mobilitas lintas negara membuat isu keamanan maritim dan politik muncul lebih menonjol dibandingkan dengan isu keamanan lainnya. Hal ini menempatkan keamanan maritim sebagai salah satu prioritas utama (Ridho & Sudirman, 2020).

## 2. KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini penulis mengadopsi dua kerangka konseptual, yaitu keamanan maritim (*maritime security*) dan keamanan manusia (*human security*), guna memahami fenomena perompakan di kawasan maritim Asia Tenggara. Konsep keamanan maritim digunakan untuk menganalisis berbagai dinamika ancaman terhadap stabilitas wilayah maritim, dalam konteks ini, keamanan maritim mencakup perlindungan terhadap jalur pelayaran, pencegahan kejahatan lintas negara seperti perompakan, penyelundupan, dan perdagangan ilegal. Studi ini menempatkan perompakan sebagai salah satu bentuk *threat multiplier* terhadap stabilitas maritim. Sementara itu, pendekatan keamanan manusia digunakan untuk menyoroti dampak langsung dari perompakan terhadap individu dan komunitas, khususnya para pelaut yang terdampak. Dalam kasus perompakan di Asia Tenggara, keamanan manusia terancam tidak hanya oleh tindak kekerasan fisik, tetapi juga oleh ketidakpastian ekonomi, ketakutan psikologis, serta hilangnya akses aman terhadap sumber daya laut.

### **Konsep Keamanan Maritim**

Menurut Bueger (2015), Keamanan maritim merujuk pada situasi di mana wilayah laut berada dalam kondisi aman dan stabil dari berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Ancaman tersebut mencakup konflik antarnegara, terorisme maritim, aksi pembajakan, perdagangan narkoba dan manusia, penyelundupan barang ilegal, kejahatan terhadap lingkungan laut, serta risiko bencana alam dan kecelakaan di laut. Ancaman terhadap keamanan maritim memiliki karakter lintas batas negara dan termasuk dalam kategori ancaman non-tradisional, yang berpotensi mengganggu stabilitas dan ketahanan keamanan suatu negara atau kawasan secara menyeluruh (Sajidin., et al 2023).

Keamanan maritim merupakan bentuk upaya sistematis untuk menjamin keselamatan, perlindungan, dan stabilitas di wilayah perairan, mencakup laut, samudra, serta jalur pelayaran strategis. Suatu kawasan dikatakan memiliki kondisi keamanan maritim yang stabil apabila terbebas dari berbagai bentuk ancaman terhadap keselamatan dan ketertiban maritim. Menurut Darmono (2010) perkembangan konseptual studi keamanan telah menyebabkan terjadinya perluasan ancaman yang dihadapi oleh negara, termasuk dalam ranah keamanan maritim. Jika sebelumnya keamanan identik dengan militer, maka dalam konteks kontemporer, definisi tersebut telah berkembang mencakup berbagai aspek non-militer. Ancaman non-tradisional dalam keamanan maritim memperluas makna ini, di mana isu-isu seperti kemajuan teknologi, kekuatan ekonomi, dinamika politik, dan aktivitas intelijen kini turut dipertimbangkan sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas maritim (Ridho & Sudirman, 2020).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang memungkinkan penulis untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena perompakan laut sebagai bentuk ancaman non-tradisional dalam konteks keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji dinamika keamanan. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk-bentuk perompakan terjadi dan upaya dalam penanggulangannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ancaman keamanan maritim.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini akan membahas fenomena perompakan laut sebagai salah satu bentuk nyata dari ancaman non-tradisional dalam kerangka keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Perompakan laut bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, tetapi juga mengancam keselamatan awak kapal, mengganggu stabilitas pelayaran internasional, dan memperlemah kepercayaan terhadap keamanan kawasan. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi mekanisme penanggulangan yang telah diterapkan oleh negara-negara di kawasan maupun peran organisasi kawasan seperti ASEAN.

## **Perompakan di Perairan Asia Tenggara**

Sebagian besar ancaman maritim di kawasan Asia Tenggara terkonsentrasi di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura. Dalam konteks persepsi ancaman, kawasan ini tidak hanya menghadapi potensi agresi militer dari negara lain, tetapi juga lebih dominan terpapar oleh ancaman non-militer yang bersifat asimetris, seperti gangguan keamanan maritim yang dapat menciptakan ketidakstabilan dan teror. Sebagai salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia, Selat Malaka memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap aksi perompakan dan terorisme maritim (Nurwahidin, et al, 2020). Salah satu bentuk ancaman paling signifikan di Selat Malaka dan Selat Singapura adalah aksi pembajakan atau perompakan bersenjata, yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas dan keamanan kawasan.

Selat Malaka dan Selat Singapura, merupakan kawasan paling rawan terhadap aksi perompakan di dunia. Antara tahun 1995 hingga 2013, sekitar 41% dari seluruh serangan perompakan global terjadi di wilayah ini, melebihi angka di Samudra Hindia bagian barat (termasuk Somalia) yang mencatat 28%, dan pesisir barat Afrika dengan 18%. Selat Malaka dan Selat Singapura berfungsi sebagai jalur pelayaran utama dunia, dilalui oleh lebih dari 120.000 kapal setiap tahunnya, yang mencakup sepertiga dari perdagangan maritim global. Sekitar 70% hingga 80% dari total impor minyak China dan Jepang melewati jalur ini. Kepadatan lalu lintas dan posisi strategis kawasan ini menjadikannya sasaran empuk bagi kelompok kriminal terorganisir. Salah satu contoh serangan yang menonjol adalah pembajakan kapal tanker Orapin 4 pada Mei 2014 (McCauley, 2014).

Dalam kurun waktu 2011 hingga 2015, wilayah Selat Malaka mengalami fluktuasi jumlah insiden perompakan laut, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2015 yang mencatat 174 insiden, sementara jumlah terendah tercatat pada tahun 2011 dengan 88 kasus. Data ini mencerminkan meningkatnya kompleksitas ancaman non-tradisional di jalur pelayaran strategis tersebut (Sari, 2019). Kecenderungan peningkatan tersebut menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengelolaan keamanan maritim, khususnya dalam pengawasan wilayah perairan yang luas dan padat lalu lintas kapal.

Selain Selat Malaka, kawasan Laut Sulu dan Laut Sulawesi, yang membentang dari wilayah Sulu di Filipina bagian selatan hingga Sabah di Malaysia timur, yang merupakan jalur pelayaran penting yang dilintasi oleh lebih dari 13.000 kapal setiap tahunnya juga dikenal sebagai salah satu pusat utama aktivitas perompakan laut yang mengkhawatirkan di Asia Tenggara. Sepanjang tahun 2016, tercatat sejumlah kasus penculikan pelaut Indonesia yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf, sebuah organisasi teroris yang beroperasi di

wilayah selatan Filipina. Situasi tersebut berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, di antaranya pada 10 Agustus 2017 ketika kapal penumpang diserang oleh dua pelaku perompakan di sekitar Pulau Nipah, Indonesia. Tidak lama setelah itu, sebuah kapal kontainer berbendera Jerman juga dilaporkan menjadi sasaran serangan perompakan di perairan dekat Filipina (Sari, 2019).

Berdasarkan analisis data selama periode 2007 hingga 2021 oleh *ReCAAP Information Sharing Centre*, teridentifikasi pola yang konsisten dalam dinamika insiden perompakan laut di kawasan Asia. Tiga bentuk utama tindak kejahatan yang dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisir mendominasi pada periode tertentu, yakni:

- Pembajakan kapal tunda dan tongkang untuk dijual kembali (2009–2014).
- Pencurian muatan minyak dari kapal tanker (2011–2017)
- Penculikan awak kapal untuk tujuan pemerasan atau tebusan (2016–2020).

Sejak tahun 2020, aktivitas penculikan terhadap awak kapal di Asia Tenggara tidak lagi dilaporkan, sementara bentuk perompakan yang masih terjadi umumnya bersifat minor atau pencurian berskala kecil. Meskipun secara kuantitatif tren insiden menunjukkan penurunan, ancaman perompakan dan kejahatan bersenjata tetap mengalami transformasi dalam modus operandi, sehingga tetap memerlukan perhatian dan respons strategis dari kawasan Asia Tenggara (Lee, 2022).

Pandemi sempat dikhawatirkan akan memperparah kondisi keamanan maritim Asia Tenggara. Meskipun terdapat kekhawatiran bahwa memburuknya kondisi ekonomi selama pandemi akan meningkatkan insiden perompakan laut, data tahun 2021 justru menunjukkan penurunan kasus ke tingkat sebelum pandemi. Namun demikian, Selat Singapura tetap menjadi salah satu area yang rentan dengan peningkatan insiden yang signifikan. Selama masa pandemi, meskipun terdapat peningkatan kasus pada tahun 2020, jumlahnya tidak sebesar lonjakan pada periode krisis sebelumnya. Beberapa faktor seperti pengalihan anggaran pemerintah untuk penanggulangan pandemi dan penurunan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir turut berkontribusi dalam meredam eskalasi kejahatan maritim. Namun, data tahun 2022 menunjukkan bahwa Selat Singapura kembali mengalami peningkatan insiden, menandakan perlunya penguatan dan perhatian berkelanjutan terhadap isu keamanan maritim di kawasan ini (Storey, 2022).

## Upaya Penanggulangan Perompakan di Perairan Asia Tenggara

Penanggulangan perompakan di kawasan Asia Tenggara dilaksanakan melalui beberapa usaha yang mencakup kerja sama regional dan bilateral. Strategi ini mencerminkan pentingnya sinergi lintas negara dalam menghadapi ancaman maritim yang bersifat transnasional. Berbagai strategi telah diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan maritim dan memperkuat sistem keamanan laut di kawasan Asia Tenggara.

### ➤ ASEAN Maritime Forum (AMF)

Salah satu bentuk kerja sama yang signifikan dalam menanggulangi aksi pembajakan dan perampokan maritim di Kawasan Asia Tenggara adalah *ASEAN Maritime Forum* (AMF). Forum ini berfungsi sebagai platform koordinatif bagi negara-negara anggota ASEAN dalam memperkuat kolaborasi guna menjaga keamanan dan stabilitas maritim di kawasan Asia Tenggara. Kejahatan lintas negara seperti pembajakan dan perampokan laut membutuhkan kerja sama yang erat antarnegara. AMF, negara-negara ASEAN bisa menyusun strategi dan kebijakan bersama untuk mengatasi kejahatan maritim, memperkuat pengawasan di wilayah laut masing-masing, serta mengambil langkah pencegahan dan penindakan yang lebih efektif terhadap pelaku kejahatan (Iqbal & Rahman, 2024).

Meningkatnya kasus pembajakan di kawasan Asia Tenggara, mendorong ekspektasi terhadap peran AMF sebagai wadah yang mampu memberikan kontribusi dalam menurunkan tingkat pembajakan serta memperkuat kerja sama antarpemerintah negara-negara anggota ASEAN. AMF sendiri memiliki dua fokus utama, yakni membahas isu-isu strategis dalam sektor kemaritiman serta mengoordinasikan berbagai bentuk kerja sama maritim yang diinisiasi oleh badan sektoral ASEAN maupun ASEAN Regional Forum (ARF). Namun demikian, kenyataannya, insiden pembajakan maritim justru mengalami peningkatan setelah pembentukan AMF. Fenomena ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pelaksanaan maupun efektivitas forum tersebut, yang perlu dikaji lebih lanjut sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan respons terhadap kejahatan maritim di kawasan (Michellia & Burhanuddin, 2024).

### ➤ ASEAN Coast Guard Forum (ACGF)

Tujuan utama dari *ASEAN Coast Guard Forum* (ACGF) mencakup penguatan kerja sama, peningkatan koordinasi, serta pengembangan hubungan *coast guard* negara-negara anggota ASEAN. Forum ini juga bertujuan untuk membangun kepercayaan antarnegara anggota dan memperkuat peran sentral ASEAN dalam menghadapi tantangan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Selain merancang agenda dan program

kerja sama untuk menjaga stabilitas laut, ACGF diharapkan pula dapat berfungsi sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian konflik maritim yang mungkin timbul di antara negara-negara di kawasan (Manullang, 2023).

Sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, ASEAN memiliki tanggung jawab untuk merespons secara efektif terhadap berbagai ancaman yang muncul. Dalam konteks ini, keberadaan ACGF diharapkan mampu berperan dalam mengatasi tantangan dan ancaman yang berkaitan dengan keamanan maritim di wilayah tersebut.

➤ **Kerja Sama Internasional melalui ReCAAP**

*Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP)* merupakan sebuah kerangka kerja sama regional yang dibentuk untuk merespons isu pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data ReCAAP 2017, perjanjian ini melibatkan partisipasi dari 20 negara anggota dan berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu *Information Sharing Center (ISC)*, penguatan kapasitas (*capacity building*), serta pengaturan kerja sama (*cooperative arrangements*), yang terdiri atas 14 negara dari kawasan Asia, 4 negara dari Eropa, serta Australia dan Amerika Serikat (Swastika, 2018).

Melalui ReCAAP negara-negara anggota melakukan usaha mencakup berbagai aktivitas, antara lain pertukaran informasi antarnegara peserta mengenai insiden perompakan di kawasan Asia, penyelenggaraan pelatihan untuk memperkuat respons terhadap perompakan, serta peningkatan kapasitas negara-negara anggota guna memperkuat kemampuan dalam menangani kejahatan maritim di wilayah tersebut.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena perompakan laut di Asia Tenggara mencerminkan bentuk nyata dari ancaman non-tradisional yang secara serius memengaruhi stabilitas dan keamanan maritim kawasan. Wilayah-wilayah strategis seperti Selat Malaka, Selat Singapura, serta Laut Sulu dan Laut Sulawesi terbukti menjadi titik rawan yang secara konsisten mengalami berbagai bentuk kejahatan maritim. Upaya penanggulangan yang dilakukan melalui kerja sama regional dan internasional menjadi aspek penting dalam merespons perompakan laut. Inisiatif seperti *ASEAN Maritime Forum (AMF)*, *ASEAN Coast Guard Forum (ACGF)*, dan ReCAAP merupakan langkah-langkah kolektif negara-negara kawasan dalam memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas keamanan maritim. Namun demikian, keberadaan forum-forum tersebut belum sepenuhnya berhasil menurunkan angka kejahatan

secara signifikan, sebagaimana tercermin dalam peningkatan insiden setelah pembentukan AMF.

## DAFTAR REFERENSI

- Aretha Michellia, A., & Burhanuddin, A. (2024). *KOLABORASI REGIONAL DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM : STUDI KASUS PERAN AMF DI ASIA TENGGARA*. *JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research*, 3(02), 98–110. <https://doi.org/10.62668/jimr.v3i02.1289>
- Fitrah, Elpeni. (2015). *Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*. *Insignia Journal of International Relations*. Vol. 2, No. 1
- Hutagalung, S. M., et al. (2020). *TANTANGAN KERJASAMA KEAMANAN DI PERAIRAN ASEAN OLEH INDONESIA PANDANGAN HUKUM DAN HUKUM INTERNASIONAL*. Tesis.
- Iqbal, & Rahman. (2024). *UPAYA MENGATASI PEMBAJAKAN DAN PERAMPOKAN DI PERAIRAN ASIA TENGGARA MELALUI ASEAN MARITIM FORUM*. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(11).
- Keliat M. (2019). *Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakan Bagi Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 13(1). <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10970>
- Labibah, S., & Fatimah, Z. S. (2024). *DINAMIKA GEOSTRATEGIS INDONESIA DAN PERANNYA DALAM KONTEKS KEAMANAN MARITIM ASIA TENGGARA*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 138-143 <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1855>
- Lee, Y. M. (2022). Piracy and armed robbery as an evolving threat to Southeast Asia’s maritime security. *Asia Maritime Transparency Initiative*. <https://amti.csis.org/piracy-as-an-evolving-threat-to-southeast-asias-maritime-security/>
- Manullang, A. J. (2023). *Mendorong Upaya Peningkatan Keamanan Maritim ASEAN: Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN Coast Guard Forum*. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(2).
- McCauley, A. (2014). *Pirates in Southeast Asia: The world's most dangerous waters*. *Time*. <https://time.com/piracy-southeast-asia-malacca-strait/>
- Nurwahidin., et al. (2020). *Kepentingan Negara-Negara Pantai Menghadapi Ancaman Transnational Non State Actor Di Selat Malaka*. *Jurnal Maritim Indonesia*, 8(2).
- Prakoso., et al. (2025). *ANCAMAN KEAMANAN MARITIM*. *Widina Media Utama*.
- Prasetya, M. R. R. (2024). *Human Security: Konflik Palestina dan Israel*. *Public Knowledge*, 1(1), 33–41. <https://doi.org/10.62771/pk.v1i1.4>
- Ridho, M., & Sudirman, A. (2020). *Signifikansi Keamanan Maritim Di ASEAN*. *MANDALA: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2(3).

- Sajidin., et al., (2023). *STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI ASIA TENGGARA*. Jurnal Lemhannas RI, 11(3).
- Sari, R. P. (2019). *UPAYA ASEAN MARITIME FORUM (AMF) DALAM MENANGGULANGI KASUS PEROMPAKAN DI PERAIRAN ASIA TENGGARA (STUDI KASUS SELAT MALAKA TAHUN 2015-2018)*. Skripsi.
- Storey, I. (2022, December 12). Piracy and the pandemic: Maritime crime in Southeast Asia, 2020–2022. Fulcrum.sg. <https://fulcrum.sg/piracy-and-the-pandemic-maritime-crime-in-southeast-asia-2020-2022/>
- Swastika, M. B. (2018). *Values and Norms Matter: Ketidakikutsertaan Indonesia dalam Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships (ReCAAP)*. Indonesian Perspective, 3(1).